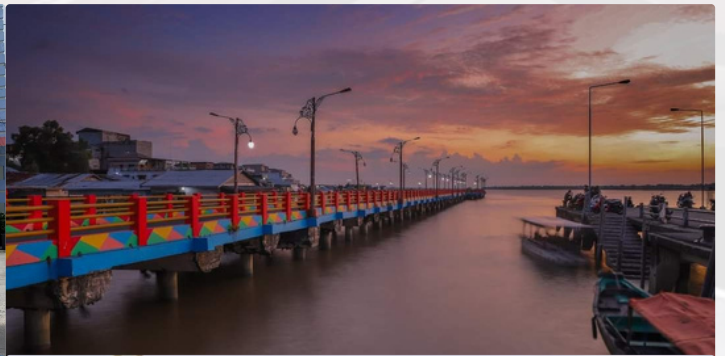




RANCANGAN AKHIR RENSTRA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Strategis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029.

Rancangan Renstra ini disusun sebagai pedoman kerja lima tahun ke depan dalam rangka mendukung visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Di dalam penyusunan Rancangan Renstra ini merumuskan Visi Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan langkah-langkah capaian kegiatan dalam upaya mendukung Visi Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

“KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI 2025”

Dengan disusunnya Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai dokumen untuk lima tahun ke depan dalam pengembangan serta pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Juli 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



JOAN PRAYUDA, SE., MM
NIP. 19810829 201001 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika	10
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1 Tujuan dan Sasaran Diskominfo	41
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Diskominfo	44
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
4.1 Uraian Program	52
4.2 Uraian Kegiatan	55
4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	58
4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	78
4.5 Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	82
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	84
BAB V PENUTUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Percepatan transformasi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sudah menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi tulang punggung dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tengah tuntutan akan pelayanan publik yang prima dan pengelolaan informasi yang transparan, peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin penting, baik sebagai penggerak inovasi digital maupun sebagai penjaga keandalan sistem informasi pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023, menetapkan susunan organisasi dan tata kerja kerja perangkat daerah dengan ke arah pembangunan daerah yang berpijak pada visi :

"Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis dan Mandiri Berinovasi"

Visi tersebut menekankan pentingnya daya saing daerah berbasis inovasi, pelayanan publik yang mudah diakses, serta keterbukaan informasi yang mendukung partisipasi masyarakat. Untuk menjawab hal tersebut, perlu dibangun sistem pemerintahan digital yang tidak hanya terpadu dan aman, tetapi juga mampu memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan real time.

Sejalan dengan arah pembangunan di tingkat Provinsi Jambi, di mana digitalisasi menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong percepatan pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang efektif, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakan dan programnya agar mendukung sinergi provinsi dan pusat.

Sebagai tindak lanjut kebijakan nasional, Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 2 Tahun 2025 memberikan arahan strategis bagi percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah. Instruksi ini menekankan pada penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pemanfaatan teknologi berbasis interoperabilitas layanan, perlindungan data serta keamanan informasi, dan penataan tata kelola statistik sektoral secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai pusat gravitasi transformasi digital di daerah, yang menjembatani konektivitas antar perangkat daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan melalui penyediaan layanan informasi yang cepat, aman, dan terukur.

Berangkat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah tergambar dengan jelas keseriusan upaya pemerintah dalam mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2025–2029 telah dirumuskan secara bertahap melalui dokumen perencanaan yang berorientasi pada penguatan fondasi digital, tata kelola data yang akurat, dan peningkatan efisiensi layanan publik. Dokumen tersebut menjadi rujukan utama dalam merancang kebijakan sektoral yang bersinergi lintas perangkat daerah, termasuk dalam bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan sistem pemerintahan berbasis digital yang inklusif dan berkelanjutan. Mulai dari pengembangan layanan berbasis elektronik, penyediaan infrastruktur jaringan yang andal,

pengelolaan keamanan siber dan persandian, hingga penyusunan dan penyajian data statistik sektoral yang mendukung proses perencanaan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan transformasi digital ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antar seluruh perangkat daerah serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh sebab itu, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak hanya berperan sebagai fasilitator teknis, melainkan juga sebagai integrator yang mengharmonisasikan berbagai aspek teknologi, sumber daya manusia, dan kebijakan guna menciptakan ekosistem digital yang kuat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029 tidak hanya dimaksudkan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai komitmen institusional untuk mengambil peran strategis dalam membangun fondasi digital daerah. Dokumen ini menjadi arah dan pijakan dalam menetapkan prioritas, sasaran, dan indikator kinerja yang terukur, sekaligus mencerminkan semangat reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik di era digital.

Dengan demikian, Rancangan Renstra ini menjadi pedoman utama yang memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika selaras dengan arah pembangunan daerah secara menyeluruh dan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sejalan dengan upaya percepatan digitalisasi di tingkat Provinsi Jambi dan nasional.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Komunikasi dan Informatika, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kurun waktu lima (5) tahun ke depan, guna melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025 sampai dengan 2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) Mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional secara berjenjang, terpadu, dan partisipatif sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Nomor 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.05.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Menjadi dasar teknis dalam penyelarasan Rencana kerja dan anggaran OPD sesuai arah kebijakan nasional dan daerah.;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 11)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjabarkan Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat jangka menengah (5 tahun) untuk diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain maksud diatas, penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 juga dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik.

2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta pihak terkait dalam urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik.
3. Menjadi acuan resmi dalam penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana program/kegiatan dan anggaran Dinas Kominfo

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- c. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- e. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- a. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
- 3.2 Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

- **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 -2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

- **BAB V PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 menyatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Pada pasal 261 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan e- government;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan *e-government*
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan *e-government*;
4. pengelolaan administrasi dinas di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi,

komunikasi dan persandian, serta layanan *e-government*;

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini adalah Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika :

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan Rancangan Rencana Strategis, Rencana kerja, Rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
 - b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;

- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat membawahkan

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan Rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan

masyarakat;

- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi kebijakan nasional, provinsi dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penyelenggaraan perizinan penyiaran.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini publik dan aspirasi publik, pengelolaan informasi kebijakan nasional, provinsi dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penyelenggaraan perizinan penyiaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi kebijakan nasional, provinsi dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penyelenggaraan perizinan penyiaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi kebijakan nasional, provinsi dan Daerah, penyediaan

konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penyelenggaraan perizinan penyiaran;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tugasnya dan pelaksanaan kesekretariatan komisi penyiaran daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi daerah, media publik dan penyiaran; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273,

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan diseminasi informasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan diseminasi informasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan diseminasi informasi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan diseminasi informasi;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan diseminasi informasi; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi, komunikasi, persandian dan perstatistikan.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, keamanan informasi dan telekomunikasi serta perstatistikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, keamanan informasi dan telekomunikasi serta perstatistikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi serta keamanan informasi dan telekomunikasi serta perstatistikan;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
- e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi serta keamanan informasi dan telekomunikasi serta perstatistikan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan teknologi informasi, komunikasi dan persandian serta

perstatistikan; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian

membawahkan :

- a. Seksi Pengelolaan Data, Statistik, dan Integrasi Sistem Informasi
- b. Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi
 - A. Seksi Pengelolaan Data, Statistik, dan Integrasi Sistem Informasi
 - (1) Seksi Pengelolaan Data, Statistik, dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan manajemen data informasi *E-government*, perstatistikan, serta integrasi sistem informasi.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data, Statistik, dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan data, statistik, dan integrasi sistem informasi;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup pengelolaan data, statistik, dan integrasi sistem informasi;
 - d. melakukan penyiapan bahan layanan manajemen data informasi *E-government*, perstatistikan, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
 - e. melakukan pengelolaan data dan statistik;

- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi lingkup pengelolaan data, statistik, dan integrasi sistem informasi;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan data, statistik, dan integrasi sistem informasi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

B. Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi

- (1) Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan keamanan informasi *E-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah dan layanan sandi telekomunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi mempunyai uraian tugas pekerjaan :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkup keamanan informasi dan sandi telekomunikasi;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup keamanan informasi dan sandi telekomunikasi;
 - d. melakukan penyiapan bahan layanan keamanan informasi *E-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah dan layanan sandi telekomunikasi;
 - e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi

- lingkup keamanan informasi dan sandi telekomunikasi;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup keamanan informasi dan sandi telekomunikasi; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

6. Bidang *E- Government*

Bidang Layanan *E-government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government* serta tata kelola *e-government*.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Bidang Layanan *E-government* menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*;
- d. penyiapan bahan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government*, tata kelola *e-government*;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Jumlah Tenaga JF ditentukan berdasarkan beban kerja.

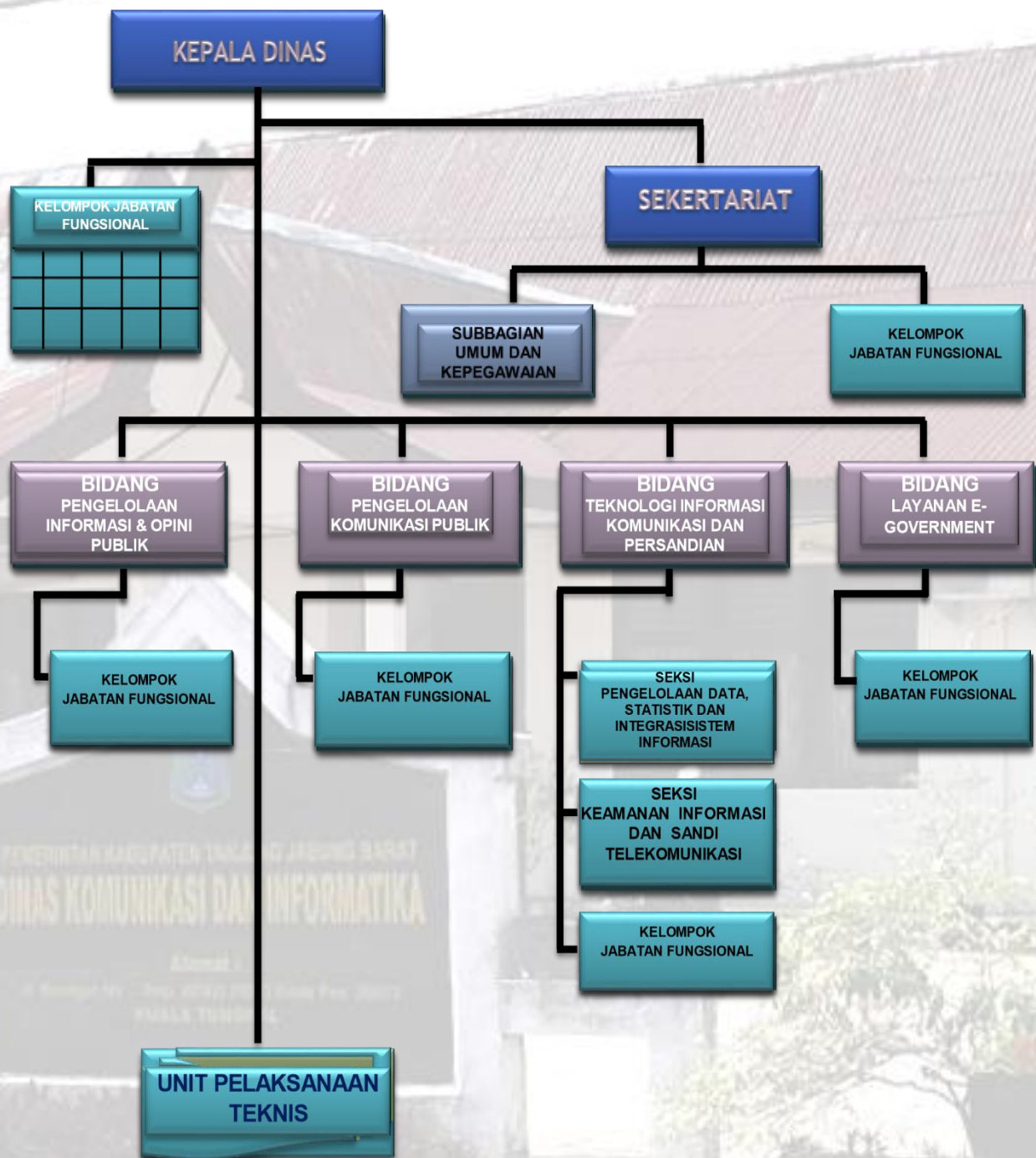
Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dinas Kominfo terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas (Eselon II), 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Dinas dan 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 3 (tiga) orang Kepala Subbagian/Seksi (Eselon IV).

1. Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian

- 
1. Seksi Pengolahan Data, Statistik, Dan Integrasi Sistem Informasi
 2. Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi
 - f. Bidang Layanan *E-government*, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



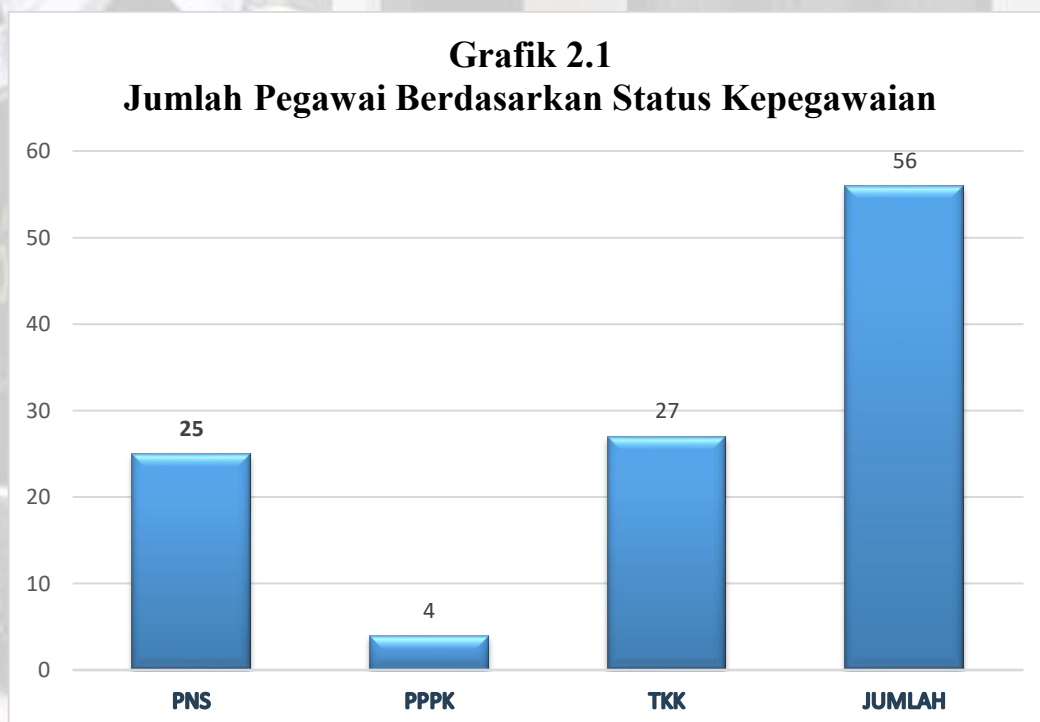
b. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sumber daya Dinas Kominfo dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang meliputi :

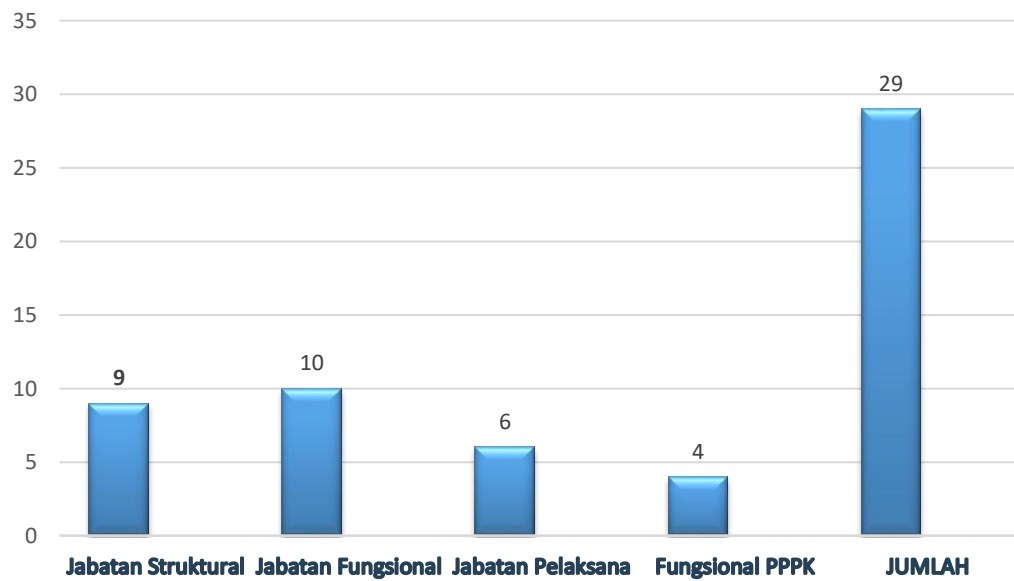
1. Sumber Daya Manusia

Upaya keberhasilan dalam meningkatkan kinerja dinas memunculkan konsekuensi diperlukannya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memiliki kompetensi khususnya di bidang teknologi informasi, baik di tingkat pengguna, pengelola maupun pimpinan. Keterbatasan SDM merupakan salah satu penyebab berbagai inisiatif pengembangan *e-government* menjadi kurang terarah dengan baik. Sementara itu untuk menjamin keberlangsungan sinergitas implementasi sistem informasi dan telematika, diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana sistem bidang teknologi informasi.

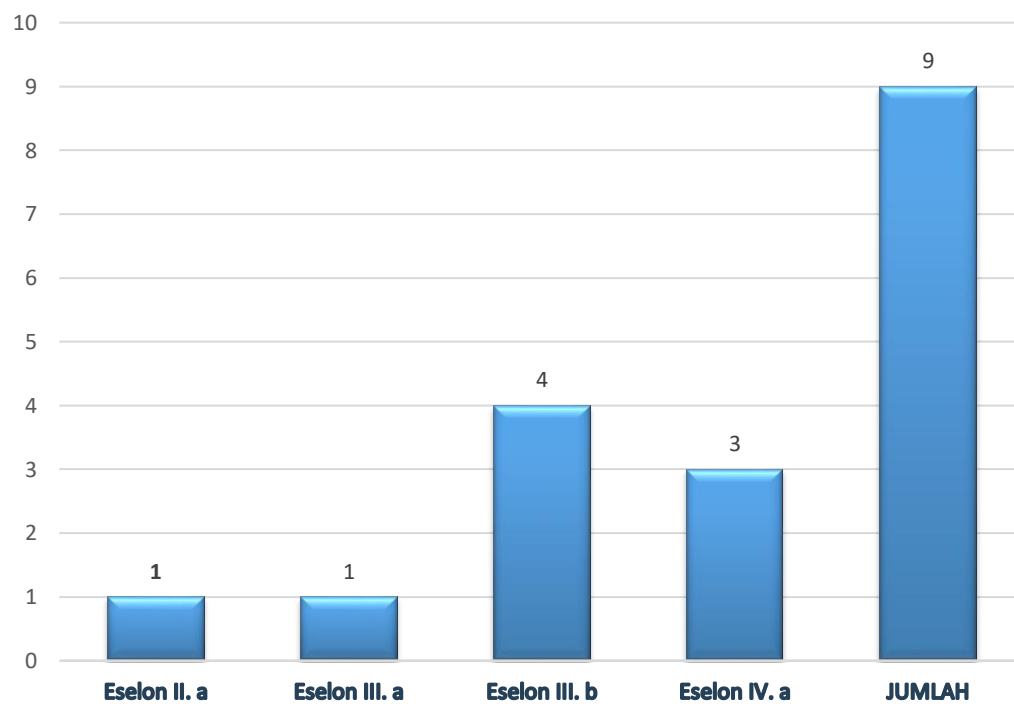
Berikut grafik formasi status kepegawaian di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



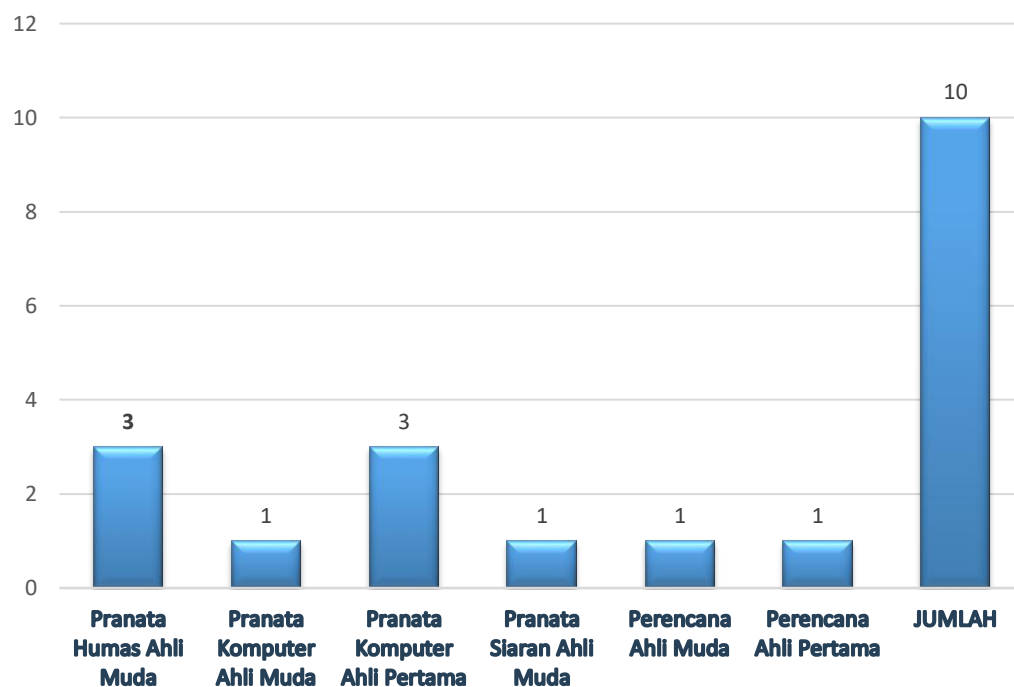
Grafik 2.2
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan



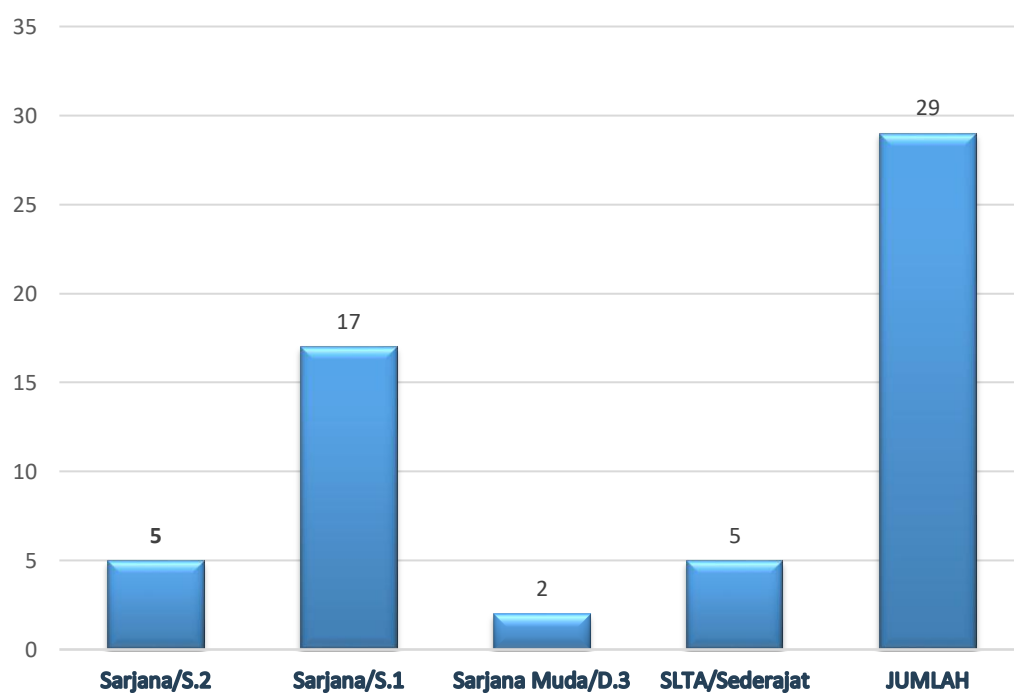
Grafik 2.3
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon



Grafik 2.4
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional



Grafik 2.5
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan



2. Sarana Dan Prasarana Penunjang

Tabel 2.6
Kondisi Infrastruktur Dasar Pelayanan Publik

NO	NAMA PERALATAN	OPERASIONAL	LOKASI
1.	2 (dua) Unit Server dan Kelengkapannya	Yang diperuntukan Server	Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Barat
2.	Aplikasi	A. 1 Paket Aplikasi SPSE dan ULP B. Paket Aplikasi PNS Mail C. Domain tanjabbarkab.go.id D. Aplikasi website dan Sub Domain Website Seluruh Perangkat Daerah dalam Kab. Tanjab Barat	Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Barat
3.	Bandwidth	-Sewa Bandwidth yang berguna untuk akses internet/Intranet ke seluruh OPD lingkup Kab. Tanjung Jabung Barat	Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Barat
		-Wifi akses internet -Akses Internet gratis yang menggunakan Bandwidth. -Akses internet gratis melalui Wifi (Hotspot Area) Yang dipasang di beberapa OPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanjab Barat Bappeda Taman Persitaj RSUD KH. DAUD ARIF Kuala Tungkal BKPSDMD Tanjab Barat Kantor Camat Bram Itam

Tabel 2.7
Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	KET
1.	Mobil Mini Bus	4	3 Baik 1 Kurang Baik	
2.	Sepeda Motor	16	Baik	
3.	Meja Kerja	12	Baik	
4.	Meja Rapat	2	Baik	
5.	Genset	1	Baik	
6.	Mesin Ketik Manual	3	2 Baik 1 Kurang Baik	

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	KET
7.	Mesin Foto Copy	1	Kurang Baik	
8.	Filling Besi/Metal	3	2 Baik 1 Kurang Baik	
9.	Lemari Kaca	1	Baik	
10.	Alat/Mesin Penghisap Asap	7	Baik	
11.	Lemari Kayu	5	3 Baik 2 Kurang Baik	
12.	Kursi Besi/Metal	6	Baik	
13.	Meja Panjang	1	Baik	
14.	Kursi Tamu	1	Kurang Baik	
15.	Kursi Lipat	6	Baik	
16.	Kursi Besi	8	Baik	
17.	Kursi ½ Biro	31	26 Baik 5 Kurang Baik	
18.	Sofa	2	Baik	
19.	Kursi Plastik	5	Kurang Baik	
20.	Laptop	12	3 Rusak Ringan	
21.	Lemari ES	1	Baik	
22.	AC	10	9 Baik 1 Kurang Baik	
23.	Kipas Angin	2	Baik	
24.	Radio	30	17 Baik 13 Kurang Baik	
25.	Televisi	1	Berat	
26.	Unit Power Supply	6	4Baik2 Kurang Baik	
27.	Stabilisator	1	Baik	
28.	Dispencer	4	3 Baik 1 Kurang Baik	
29.	Kamera	3	Baik	
30.	Bel Listrik	1	Baik	
31.	Person Komputer Lain-Lain	1	Baik	
32.	PC Unit (Personal Computer)	5	Baik	
33.	Lap Top	9	Baik	
34.	Note Book	5	Baik	
35.	Hard Disk	2	Baik	
36.	Printer	6	Baik	

a. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi:

A. PENERAPAN TATA KELOLA TIK dalam hal ini Pemeringkatan E-Goverment merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah
 2. Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.
 3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada khususnya dan secara nasional pada umumnya.
- B. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik;
- C. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk memberdayakan masyarakat dalam mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya, guna meningkatkan nilai tambah secara makro.
- D. MEDIA ON-LINE merupakan fasilitas akses informasi portal resmi pemerintah, dengan tujuan memudahkan masyarakat dan pemerintah menyampaikan informasi dan komunikasi melalui situs <https://diskominfo.tanjabbarkab.go.id> dan Media sosial.
- E. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

- 
- F. PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK mempunyai tugas membantu Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik.
- G. PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL melaksanakan Pengelolaan Data Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten, dan Data Statistik Sektoral adalah sebagai data yang digunakan untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan dan sebagai layanan manajemen data informasi perstatistikan, integritas layanan publik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- H. PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI melaksanakan Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga Sandi Negara serta melakukan pengelolaan pengamanan informasi pemerintah daerah maupun untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi pengelolaan sumber daya pengamanan komunikasi

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Terintegrasinya jaringan komunikasi data antar Perangkat Daerah dalam Kab. Tanjab Barat				8 OPD	31 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	8 OPD	31 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah sarana dan prasarana saluran komunikasi data antar OPD dalam Kab. Tanjab Barat				-	-	1 Ruang data center dan 1 ruang comand center	1 Ruang data center dan 1 ruang comand center	1 Ruang data center dan 1 ruang comand center	-	1 Ruang data center dan 1 ruang comand center	1 Ruang data center dan 1 ruang comand center	1 Ruang data center dan 1 ruang comand center	1 Ruang data center dan 1 ruang comand center	0%	0%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya pengawasan menara telekomunikasi				-	96 Menara	100 Menara	114 Menara	114 Menara	-	100 Menara	105 Menara	126 Menara	126 Menara	-	104%	105%	110%	110%
4.	Tersedianya layanan informasi dan komunikasi publik				-	4 Media komunikasi	4 Media komunikasi	4 Media komunikasi	4 Media komunikasi	-	4 Media komunikasi	4 Media komunikasi	4 Media komunikasi	4 Media komunikasi	-	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah informasi melalui media komunikasi				-	1000 Berita	1200 Berita	1500 Berita	1700 Berita	-	800 Berita	1300 Berita	1600 Berita	2000 Berita	-	80%	108%	106%	117%
6.	Jumlah OPD dengan tatakelola pemerintahan berbasis elektronik				31 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	31 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Jumlah sumber daya aparatur yang berbasis TIK				-	-	12 Orang	12 Orang	13 Orang	-	-	7 Orang	9 Orang	8 Orang	-	-	58%	75%	65%

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,225,536,520	5,321,462,268	4,613,904,356	5,022,826,699	4,724,155,093	1,078,999,685	4,278,035,754	4,390,110,299	4,715,471,211	-	88%	80%	95%	94%	0%	4,181,576,987	2,892,523,390
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6,178,999,850	3,321,349,850	3,244,034,800	3,366,111,000	3,385,764,500	3,183,305,850	3,316,480,500	3,230,880,705	3,290,023,344	-	52%	100%	100%	98%	0%	3,899,252,000	2,604,138,080
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1,963,090,000	2,327,721,720	1,915,663,600	2,886,583,000	3,071,920,400	1,942,596,243	2,324,851,524	1,915,197,500	2,883,350,000	-	99%	100%	100%	100%	0%	2,432,995,744	1,813,199,053
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	42,500,000	39,700,000	82,600,000	29,325,000	-	42,345,000	39,450,000	82,400,000	-	-	100%	99%	100%	0%	38,825,000	32,839,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	65,404,914	37,599,800	47,350,000	145,000,000	-	64,555,000	37,399,800	45,750,000	-	-	99%	99%	97%	0%	59,070,943	29,540,960

c. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Di dalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan perlu memperhatikan lingkungan kerja karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Lingkungan kerja diciptakan agar tetap berada dalam keadaan yang kondusif.

Sebagaimana dijelaskan di awal, pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara umum dikatakan sudah memenuhi harapan masyarakat. Namun, seiring dengan perubahan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks. Hal ini tentunya berimplikasi pada perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin canggih. Kemajuan tersebut seyogyanya harus mampu direspon oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika. Akan tetapi, berbagai permasalahan dan kendala kerap dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan responsif. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyelaraskan kemampuan/kapasitas yang dimilikinya sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Kemampuan itu tentunya harus berorientasi pada pelayanan informasi yang memuaskan dengan terus berupaya merespon keinginan dan harapan publik dengan menghadirkan program dan kegiatan yang relevan, efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan informasi yang cepat, murah dan akuntabel dengan memperhatikan dan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada.

(1) Ada beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya pengembangan pelayanan OPD, di antaranya :

- 
- a. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam dinamika pembangunan daerah di Tanjung Jabung Barat yang mengarah kepada “daya saing”.
 - b. Pemerataan akses data dan informasi di berbagai sektor belum maksimal, baik dalam lingkup OPD, maupun masyarakat, khususnya dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance).
 - c. Pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan dan pengembang TIK masih rendah, khususnya dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat.
 - d. Sikap proaktif masyarakat terhadap pengembangan dan pemberdayaan TIK belum optimal.

(2) Selain tantangan yang ada, terdapat juga peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya pengembangan pelayanan informasi, seperti :

- a. Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Pusat Data (data center) dalam pengelolaan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sekaligus diharapkan sebagai konsultan perencanaan Bidang Komunikasi dan Informatika bagi Pemerintah;
- b. Memanfaatkan jaringan komunikasi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai modal utama dalam percepatan arus pertukaran dan diseminasi informasi antar OPD, seperti: Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), Akses Internet dan Intranet;
- c. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan TIK mulai berkembang yang diharapkan dapat mendongkrak “daya saing” perekonomian Tanjung Jabung Barat;
- d. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.

Di balik tantangan yang ada, terdapat juga peluang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya pengembangan pelayanan dasar (minimal), sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Permenkominfo RI) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota memberikan harapan baru dalam peningkatan pelayanan informasi publik.

Upaya merealisasikan harapan dan peluang tersebut tidaklah semudah membalikkan kedua telapak tangan, dibutuhkan kemampuan SDM yang handal dan kompeten di bidang komunikasi dan informatika. Selain itu, dukungan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pendukung sangat dibutuhkan, antara lain gedung / kantor yang representatif, peralatan teknologi telematika, baik yang digunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan LAN, WAN dan pemanfaatan intranet dan internet.

Untuk itu perlu dilakukan upaya pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan konten Sistem Aplikasi OPD dalam satu *Network Operating Center* (NOC) guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Masyarakat serta *Stakeholder* untuk mengakses data dan informasi dari pusat data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui komputer secara intranet maupun internet di ruangan masing-masing baik untuk mencari informasi maupun menyebarluaskan informasi yang dimilikinya. Dengan demikian, diharapkan semua pihak, khususnya aparatur menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang.

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat merencanakan optimalisasi pembangunan, pengelolaan dan pengembangan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat dan pemberdayaan masyarakat tetap menjaga dan mempertimbangkan dari aspek prioritas pembangunan daerah, menyeluruh, merata, seimbang dan tetap menjaga kondusivitas keberagaman.

Upaya tersebut dilaksanakan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima yang dicapai melalui program dan kegiatan yang relevan berdasarkan visi dan misi Bupati Tanjung Jabung Barat periode Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, sebagaimana diuraikan dalam lampiran Indikator Kinerja Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun kondisi yang diinginkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Menjadikan lokal government (pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat) sebagai pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat database daerah dimana semua lembaga / institusi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat interkoneksi dalam satu *Network Operating Center* (NOC);
2. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalan signifikan;
3. Peningkatan kualitas SDM dan sosialisasi IT bidang komunikasi dan informatika dengan sasaran aparatur pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, swasta, dan masyarakat serta komunitas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana telematika pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi secara berkesinambungan;
6. Pengembangan infrastruktur telematika sampai tingkat Kecamatan

sehingga penjaringan data dapat dilakukan secara online dalam waktu relatif cepat dan efisien;

7. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah;
8. Adanya pengembangan Informasi dan Komunikasi melalui kemitraan media massa;
9. Adanya pembinaan dan pengembangan Media Tradisional di seluruh kecamatan se-Tanjung Jabung Barat secara berkesinambungan untuk memantapkan diseminasi informasi kepada masyarakat;
10. Adanya pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai lumbung informasi bagi Pemerintah Kabupaten di Kecamatan berbasis IT;
11. Pengembangan konten website Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meliputi Aplikasi Sistem Informasi OPD, baik internet maupun intranet;
12. Pengembangan implemementasi e-goverment di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
13. Adanya regulasi berupa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat yang memberi kepastian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informatika dan di dalamnya terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) seperti mengenai tata cara infrastruktur dibangun, prosedur aplikasi dibangun untuk kemudian digunakan sebagai pengelolaan data online, termasuk juga perencanaan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kelompok sasaran layanan yang mencerminkan target penerima manfaat dari seluruh

program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian. Penetapan kelompok sasaran ini disusun untuk memastikan seluruh layanan publik yang diberikan tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung terhadap pembangunan komunikasi dan informatika daerah, keterbukaan informasi publik, keamanan informasi, pengelolaan data dan statistik sektoral, serta transformasi digital pemerintahan.

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika secara rinci adalah sebagai berikut:

(1) Masyarakat Umum

Masyarakat umum merupakan seluruh individu atau kelompok warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan akses informasi, literasi digital, serta layanan komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses.

Kriteria :

- Tidak memiliki kecakapan digital yang memadai
- Rentan terhadap hoaks dan disinformasi
- Tidak memiliki akses informasi publik yang merata
- Membutuhkan edukasi terkait hak atas informasi publik dan perlindungan data pribadi

(2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

OPD sebagai pengguna utama sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan data statistik sektoral, merupakan kelompok sasaran layanan infrastruktur TIK, pengelolaan aplikasi, keamanan informasi, dan metadata sektoral.

Kriteria :

- Menggunakan jaringan intra-pemerintah (Intranet)
- Mengelola aplikasi layanan publik
- Menghasilkan atau menggunakan data statistik sektoral
- Melaksanakan fungsi PPID pelaksana

(3) Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penyebaran informasi publik dan penguatan literasi digital.

Kriteria :

- Dibentuk oleh masyarakat atau fasilitasi pemerintah
- Aktif dalam kegiatan diseminasi informasi
- Berperan sebagai agen literasi digital lokal
- Mengelola media komunikasi lokal (media sosial, buletin, dll)

(4) Pelajar dan Mahasiswa

Generasi muda sebagai pengguna aktif teknologi digital dan media sosial yang rentan terhadap pengaruh negatif internet dan membutuhkan pembinaan literasi digital.

Kriteria :

- Berusia 12-25 tahun dan aktif belajar
- Pengguna aktif media sosial
- Minim pemahaman etika digital dan keamanan informasi
- Rentan terhadap hoaks, penipuan digital, dan cyberbullying

(5) Media Massa dan Wartawan

Media dan jurnalis profesional yang menjadi mitra strategis penyebarluasan informasi pembangunan dan kebijakan daerah.

Kriteria :

- Terdaftar di Dewan Pers atau memiliki legalitas jurnalistik
- Meliput kegiatan Pemda secara aktif
- Menjadi peserta kemitraan media pemerintah

Penetapan kelompok sasaran ini menjadi acuan penting dalam penyusunan strategi, program, kegiatan, dan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029. Kelompok sasaran ini sekaligus menjadi pijakan dalam menerapkan prinsip inklusivitas, efektivitas, dan transparansi layanan komunikasi dan informatika di daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari dinamika perkembangan teknologi informasi, kebutuhan pelayanan publik berbasis digital, serta tuntutan akan keterbukaan informasi yang semakin meningkat. Oleh karena itu, penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah perlu mempertimbangkan secara serius berbagai permasalahan dan isu strategis yang muncul di wilayah sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan mengidentifikasi permasalahan yang kerap muncul secara akurat, diharapkan setiap program dan kegiatan yang dirancang mampu menjawab tantangan yang ada, atau paling tidak dapat meminimalisir dampak dari permasalahan tersebut terhadap efektivitas pelayanan publik dan pengelolaan informasi pemerintahan.

Proses identifikasi permasalahan menjadi tahapan penting dalam analisis isu-isu strategis yang sangat menentukan arah pembangunan bidang komunikasi dan informatika. Perumusan isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan ketepatan prioritas pembangunan, operasional dalam pelaksanaan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etis, dan kelembagaan.

Isu strategis dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kondisi atau persoalan penting yang perlu dike depankan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi pemerintah daerah dan masyarakat di masa depan. Isu strategis juga dapat diartikan sebagai situasi yang apabila tidak diantisipasi sejak dini, akan menimbulkan hambatan besar dalam pembangunan daerah yang berbasis digital.

Karakteristik isu strategis meliputi hal-hal yang bersifat mendasar, penting, berjangka panjang, bersifat kelembagaan, serta menentukan arah dan tujuan pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, analisis yang

menyeluruh terhadap fakta, data, dan kondisi sektoral diperlukan untuk menghasilkan rumusan isu strategis yang tepat dan relevan.

Sumber-sumber eksternal seperti dinamika kebijakan nasional, perkembangan teknologi global, tuntutan masyarakat akan layanan publik yang cepat dan transparan, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan penyedia layanan digital juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis isu strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika di daerah.

Permasalahan utama yang saat ini dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:

- (1) Belum meratanya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh wilayah kabupaten, terutama di desa-desa dan daerah pesisir, menyebabkan ketimpangan akses terhadap informasi dan layanan digital.
- (2) Rendahnya literasi digital masyarakat dan aparatur pemerintah daerah, yang berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan layanan pemerintahan berbasis elektronik serta rendahnya partisipasi masyarakat terhadap informasi publik.
- (3) Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan digitalisasi pemerintahan, meskipun telah tersedia dukungan regulasi dan perangkat peraturan yang mendorong penguatan layanan digital dan keterbukaan informasi.
- (4) Masih terbatasnya akses jaringan komunikasi di wilayah tertentu, yang memerlukan peningkatan kerja sama dengan operator seluler dan penyedia layanan internet untuk perluasan jangkauan layanan.
- (5) Belum maksimalnya pelaksanaan dan pengawasan terhadap regulasi pengelolaan data dan keamanan informasi, termasuk keterbatasan pemahaman atas perangkat hukum yang telah tersedia terkait keterbukaan informasi, statistik sektoral, dan perlindungan data.

Dari kelima permasalahan di atas, telah dipetakan sejumlah isu strategis Diskominfo, yang dirumuskan berdasarkan gap (kesenjangan) antara kondisi saat ini dengan yang direncanakan, serta mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat dan pembangunan di masa depan.

Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.10

Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS KOMINFO	PERMASALAHAN DINAS KOMINFO	ISU KLHS RELEVAN DENGAN DINAS KOMINFO	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KOMINFO			ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya infrastruktur dasar TIK di ibu kota kabupaten dan sebagian wilayah kecamatan	Terbatasnya SDM yang trampil dan profesional di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Ketimpangan akses dan kapasitas TIK antarwilayah	Kesenjangan digital antarnegara dan risiko eksklusi informasi bagi masyarakat rentan di era digitalisasi global	Percepatan transformasi digital melalui kebijakan SPBE dan Satu Data Indonesia sebagai dasar layanan publik	Belum meratanya infrastruktur dan layanan TIK di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Belum meratanya ketersediaan infrastruktur TIK antarwilayah dalam kabupaten
	Belum meratanya infrastruktur TIK di seluruh wilayah kabupaten					
Dukungan kebijakan nasional dan daerah terhadap digitalisasi pemerintahan	Masih rendahnya pemanfaatan dan integrasi layanan pemerintahan berbasis digital antar-perangkat daerah	Belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang mendukung pelayanan publik inklusif dan berkelanjutan	Tuntutan digitalisasi global dan keterbukaan data pemerintahan	Transformasi digital melalui SPBE dan Satu Data Indonesia	Terbatasnya implementasi digitalisasi layanan publik di tingkat daerah	Belum optimalnya implementasi kebijakan digitalisasi pemerintahan di daerah
Adanya komitmen daerah untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dan pelayanan berbasis elektronik	Keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah dan instansi	Belum meratanya akses informasi publik yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan	Tuntutan transparansi dan keterbukaan informasi dalam tata kelola pemerintahan	Penguatan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Masih terbatasnya pemanfaatan media informasi publik oleh masyarakat daerah	Belum optimalnya keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan layanan elektronik dalam mendukung partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintahan
Akses ke jaringan komunikasi melalui kerja sama dengan operator seluler dan penyedia layanan internet	Belum semua wilayah kabupaten memiliki akses jaringan komunikasi dan internet yang memadai	Ketimpangan akses informasi dan layanan digital akibat belum meratanya infrastruktur jaringan komunikasi	Kesenjangan digital antara wilayah maju dan berkembang	Program penyediaan akses internet desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal)	Masih ada desa/kelurahan blank spot (tidak terjangkau sinyal)	Belum meratanya ketersediaan akses jaringan komunikasi di seluruh wilayah kabupaten
Tersedianya perangkat peraturan mengenai pengelolaan data dan informasi publik, statistik sektoral, dan keamanan informasi	Belum maksimalnya pelaksanaan regulasi terkait pengelolaan data, informasi publik, dan keamanan informasi oleh perangkat daerah	Lemahnya tata kelola informasi dan perlindungan data yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap pelayanan digital	Ancaman keamanan siber dan perlindungan data pribadi	Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi dan kebijakan Satu Data Indonesia	Belum meratanya pemahaman dan pelaksanaan regulasi pengelolaan data di OPD	Belum optimalnya pelaksanaan dan pengawasan terhadap regulasi pengelolaan data, informasi publik, dan keamanan informasi di tingkat daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

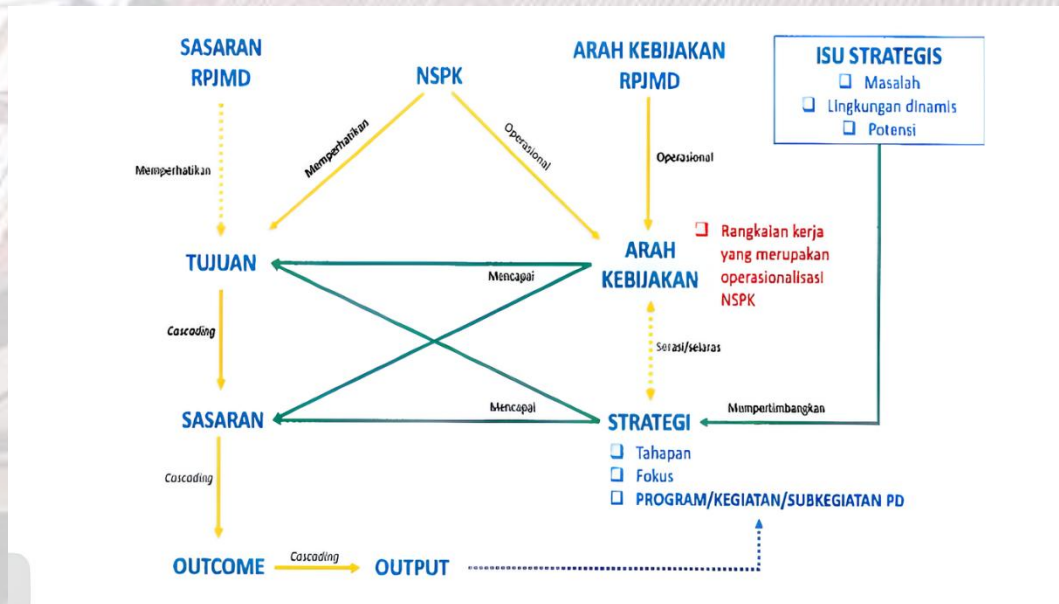
Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 penentuannya didasarkan pada NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan serta sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangan kondisi saat ini, sehingga penentuan tujuan Renstra Tahun 2025-2029 oleh Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Resnta PD direkomendasikan agar cukup memiliki 1 (satu) tujuan dengan menggabungkan 3 (tiga) urusan yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk lebih signifikan dapat dijabarkan tujuan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menggambarkan kemanfaatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Sedangkan sasaran dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Tahun 2025-2029.

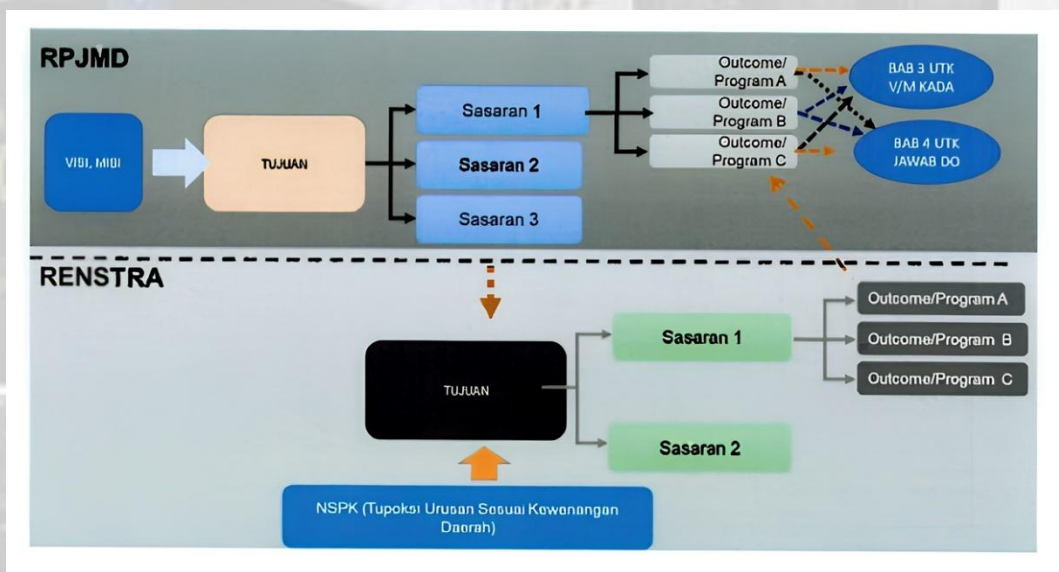
Berikut Gambar 3.1 Konsep Renstra PD dan Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD, serta Tabel 3.3 Pernyataan

tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 berdasarkan In Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Resnta PD.

Gambar 3.1
Konsep Renstra PD



Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran

tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, impact harus memberi pengertian sebagai ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
-Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah -Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Tata kelola Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi, Keterbukaan Informasi, serta Pelayanan Publik yang Transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	75	80	84	86	90	95	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	82	85	88	90	92	
		Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	70%	75%	75%	80%	80%	80%	
		Terselenggaranya Layanan Pemerintah Secara Digital	Index SPBE	2,95	3,00	3,05	3,10	3,25	3,35	
		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Meningkatnya Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi	Index Pembangunan Statistik (IPS) Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2,23 40%	2,35 47%	2,35 54%	2,50 63%	2,50 67%	2,60 70%	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan wewenang, visi, misi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program. Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi, ditetapkanlah strategi pembangunan Komunikasi dan Informatika yang merupakan arah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

Strategi Sektor Komunikasi dan Informatika :

- a. Membangun Jaringan Komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Meningkatkan jumlah OPD dalam Kab. Tanjung Jabung Barat terhubung jaringan internet
- c. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
- d. Mengembangkan dan menyelenggarakan sistem pelayanan informasi publik
- e. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kab. Tanjung Jabung Barat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media.

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan

tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menentukan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan beberapa kebijakan pembangunan untuk lima tahun ke depan yaitu :

- a. Membangun saluran komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Meningkatkan Melaksanakan Pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet dan intranet lingkup pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
- c. Meningkatkan pengawasan menara telekomunikasi .
- d. Membangun sistem layanan informasi publik
- e. Menyelenggarakan penilaian dan pembinaan kepada masyarakat dan komunitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Kab. Tanjung Jabung Barat
- f. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
- g. Melaksanakan penyelenggaraan layanan komunikasi pendukung penerapan e- Government di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Hubungan hirarki antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Komunikasi dan Informatika Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 3.4.berikut :

Tabel 3.4

VISI :				Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI			
MISI :				Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan	
Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam komunikasi publik		Penguatan PPID dan peningkatan pelayanan informasi publik	

VISI : Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI			
MISI : Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi pembangunan daerah	Penyusunan pedoman dan kampanye informasi publik
		Meningkatkan kapasitas SDM pengelola informasi dan komunikasi publik	Pelatihan kehumasan dan literasi digital bagi ASN
		Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemerintah	Pengelolaan aktif media sosial dan website resmi OPD
		Meningkatkan sinergi antar instansi dalam komunikasi publik	Koordinasi lintas OPD dalam penyebarluasan informasi
		Meningkatkan literasi informasi publik pada masyarakat	Edukasi masyarakat melalui konten informatif dan kreatif
		Penguatan penyampaian narasi kebijakan pembangunan	Diseminasi kebijakan daerah secara terbuka dan konsisten
	Terlaksananya Layanan Pemerintah Secara Digital	Meningkatkan penerapan SPBE di seluruh perangkat daerah	Implementasi arsitektur SPBE nasional di lingkungan OPD
		Mendorong integrasi layanan pemerintahan berbasis digital	Pengembangan dan penyelarasan sistem layanan digital OPD

VISI : Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI			
MISI : Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Peningkatan kualitas aplikasi pelayanan publik digital	Standarisasi dan interoperabilitas aplikasi layanan publik
		Penguatan infrastruktur jaringan dan pusat data daerah	Penyediaan jaringan internet dan server yang andal
		Pengembangan layanan publik berbasis aplikasi mobile	Digitalisasi layanan publik ke dalam platform Android/iOS
		Mendorong pemanfaatan identitas dan tanda tangan elektronik	Implementasi sertifikat elektronik pada layanan pemerintah
		Penerapan sistem administrasi pemerintahan tanpa kertas	Implementasi e-office dan manajemen dokumen digital
	Meningkatnya OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Pembangunan Daerah	Peningkatan literasi dan kapasitas statistik perangkat daerah	Pelatihan dan bimbingan teknis statistik sektoral bagi OPD
		Penguatan peran walidata dalam koordinasi statistik sektoral	Optimalisasi forum data dan mekanisme validasi data sektoral
		Penyediaan data statistik sektoral yang akurat dan mutakhir	Pengembangan dashboard statistik dan integrasi data sektoral

VISI : Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI			
MISI : Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Peningkatan kualitas dokumentasi dan metadata statistik	Standarisasi format metadata statistik di tiap OPD
		Penyusunan analisis statistik untuk mendukung perencanaan	Pemanfaatan data statistik dalam penyusunan dokumen pembangunan
		Mendorong integrasi data sektoral dengan portal satu data	Interoperabilitas data daerah dengan data nasional
		Evaluasi berkala atas pemanfaatan data dalam perencanaan	Monitoring penggunaan data statistik oleh OPD
	Meningkatnya Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi	Meningkatkan kesadaran keamanan informasi di kalangan ASN	Sosialisasi dan pelatihan literasi keamanan siber
		Memperkuat pengamanan infrastruktur sistem elektronik daerah	Penerapan firewall, antivirus, dan sistem proteksi data
		Mendorong penyusunan kebijakan keamanan informasi internal	Regulasi dan SOP pengelolaan keamanan informasi OPD
		Penanganan insiden siber secara cepat dan terukur	Pembentukan tim tanggap insiden keamanan siber (CSIRT)

VISI : Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI			
MISI : Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan penggunaan sistem kendali akses elektronik	Penggunaan autentikasi multi-faktor pada layanan internal
		Audit dan evaluasi keamanan sistem secara berkala	Penilaian indeks keamanan informasi pemerintah daerah
		Pemanfaatan teknologi enkripsi dalam pertukaran data	Implementasi standar enkripsi nasional dalam sistem pemerintah

Di samping itu, langkah selanjutnya adalah penahapan Pembangunan yang merupakan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika. Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan infrastruktur dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	Integrasi sistem layanan digital dan penguatan kapasitas SDM TIK	Optimalisasi pemanfaatan data dan transformasi pelayanan publik berbasis elektronik	Perluasan layanan digital hingga tingkat kecamatan dan desa	Konsolidasi dan keberlanjutan transformasi digital daerah

Arah dan kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi

dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut teknik dalam merumuskan arah kebijakan Renstra disajikan pada tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6
Perumusan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital	Penguatan infrastruktur dan layanan SPBE di seluruh perangkat daerah	
2	Merumuskan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Optimalisasi peran diseminasi informasi dan layanan keterbukaan informasi publik melalui media resmi	
3	Melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika	Penguatan pengambilan kebijakan berbasis data	Pengelolaan dan integrasi data sektoral menuju Satu Data Daerah	
4	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika	Peningkatan kualitas layanan publik berbasis elektronik	Monitoring dan evaluasi penerapan SPBE di perangkat daerah serta pengukuran indeks SPBE	
5	Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya	Meningkatkan kapasitas SDM dan tata kelola pemerintahan	Peningkatan literasi digital, keamanan informasi, dan pelatihan teknis TIK bagi ASN dan masyarakat	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian.

Penyusunan program dan kegiatan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 serta memperhatikan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya.

Program dan kegiatan yang dirumuskan diharapkan mampu mendukung peningkatan pelayanan informasi publik, penguatan infrastruktur teknologi informasi, penyelenggaraan statistik sektoral yang terpadu, serta perlindungan informasi pemerintah daerah secara berkelanjutan.

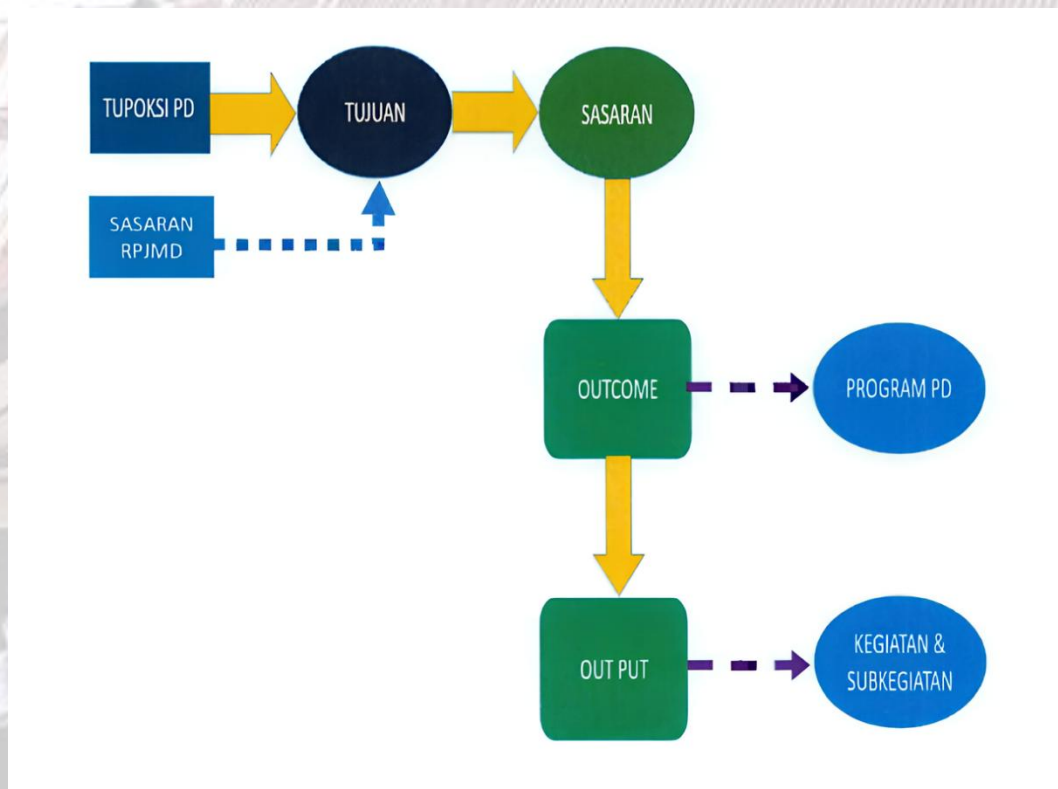
Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Oleh sebab itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja mengacu pada beberapa kriteria antara lain (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4)

terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara terperinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 diuraikan pada tabel 4.1 berikut :

Gamabar 4.1
Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



4.1 Uraian Program

Sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam RPJMD 2025–2029, maka dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun berbagai program dan kegiatan yang terarah. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika, dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual serta potensi yang dimiliki setiap wilayah. Adapun program yang telah dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas

Komunikasi dan Informatika merupakan program strategis yang berfungsi sebagai tulang punggung operasional kelembagaan. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik eksternal, program ini berperan penting dalam mendukung tata kelola internal perangkat daerah. Cakupan program meliputi perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, dan dukungan administrasi perkantoran. Melalui penguatan sistem administrasi dan manajemen yang efisien, program ini memastikan kelancaran pelaksanaan program prioritas Diskominfo lainnya. Dalam konteks pelaksanaan Renstra Tahun 2025–2029, program ini menjadi fondasi yang memungkinkan Diskominfo menjalankan fungsi koordinatif, teknis, dan regulatif secara profesional, akuntabel, serta adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan program utama yang bertujuan meningkatkan keterbukaan informasi, memperluas akses publik terhadap informasi pembangunan, serta mengelola opini publik secara strategis. Melalui program ini, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan layanan informasi, pengelolaan media komunikasi pemerintah, diseminasi informasi strategis, serta penguatan kapasitas kehumasan di lingkungan perangkat daerah. Selain itu, program ini mendukung penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas layanan informasi publik. Dalam kerangka RPJMD 2025–2029, program ini diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi aplikasi untuk mendukung digitalisasi layanan pemerintahan

daerah. Cakupan kegiatan meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan integrasi aplikasi-aplikasi layanan publik dan pemerintahan, pengelolaan domain dan subdomain resmi pemerintah daerah, serta peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Program ini juga mendukung interoperabilitas sistem informasi lintas perangkat daerah melalui integrasi data dan layanan berbasis elektronik. Dalam konteks pelaksanaan Renstra 2025–2029, program ini ditujukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efisien, terintegrasi, dan inovatif guna mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan akuntabel.

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan relevan guna mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti. Melalui program ini, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, publikasi, dan penyebarluasan data statistik sektoral yang berasal dari perangkat daerah. Program ini juga mencakup penguatan tata kelola statistik sektoral, pembinaan terhadap OPD dalam pelaksanaan statistik sektoral, serta peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Dalam kerangka Renstra, program ini diarahkan untuk mendukung transformasi perencanaan pembangunan yang berbasis data, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, serta memperkuat kolaborasi antar sektor melalui data yang terintegrasi dan terbuka.

e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini bertujuan untuk memastikan keamanan informasi pemerintahan daerah dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar sistem. Kegiatan dalam program ini meliputi implementasi teknologi persandian, penyediaan layanan sertifikat elektronik, pembinaan keamanan informasi, serta penguatan infrastruktur dan regulasi keamanan siber. Program ini juga mendukung pelaksanaan

pengamanan data strategis serta penggunaan tanda tangan digital pada dokumen pemerintahan. Dalam pelaksanaan Renstra 2025–2029, program ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapan keamanan informasi pemerintahan daerah dan mendorong adopsi layanan digital yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan standar nasional maupun global.

4.2 Uraian Kegiatan

Dalam mewujudkan program di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan urusan komunikasi dan informatika di daerah. Uraian kegiatan ini disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari program-program yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai langkah sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di bidang komunikasi dan informatika.

Setiap kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan relevansi terhadap urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, termasuk pengelolaan informasi publik, pengembangan aplikasi dan sistem elektronik pemerintahan, statistik sektoral, dan pengamanan informasi. Kegiatan juga disesuaikan dengan arah kebijakan transformasi digital nasional, penguatan keterbukaan informasi publik, serta kebutuhan aktual masyarakat dan perangkat daerah dalam memperoleh layanan informasi yang cepat, akurat, dan aman.

Penyusunan kegiatan dilakukan secara terukur, realistis, dan akuntabel, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kesinambungan pelaksanaan antar tahun anggaran. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta outcome dan output yang jelas dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik :
 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 2. Relasi Media
 3. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 4. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 5. Pelayanan Informasi Publik
 6. Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 7. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
 8. Diseminasi Informasi
 9. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 10. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
 11. Penyusunan Konten
 12. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
 - c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika :
 1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
 3. Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 4. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
 5. Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
 6. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

7. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
 8. Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
 9. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
 10. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
 11. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
 12. Penyediaan Akses Internet
 13. Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
 14. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
 15. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral :
1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota
 2. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 4. Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi :
1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 3. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
 4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

5. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan langkah strategis dalam menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam bentuk operasional yang terstruktur, terukur, dan berbasis kinerja.

Perencanaan ini disusun dengan menggunakan pendekatan logical framework, analisis kondisi aktual bidang komunikasi dan informatika, serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah seperti RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN), dan regulasi teknis seperti Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari kementerian terkait.

Program dikembangkan sebagai kerangka besar untuk mencapai outcome strategis dalam bidang komunikasi publik, layanan informasi, teknologi informasi dan persandian. Kegiatan berperan sebagai unit pelaksana utama yang menghasilkan output spesifik, sedangkan subkegiatan dirancang sebagai unit teknis operasional terkecil untuk mendukung kelancaran dan efisiensi implementasi program dan kegiatan.

Setiap subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, dan pagu indikatif, yang disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dapat dilakukan secara efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Proses perumusan ini bertujuan untuk menciptakan keterkaitan yang logis antara aspek perencanaan dan pelaksanaan, serta untuk merespon berbagai isu strategis sektor komunikasi dan informatika seperti peningkatan literasi digital masyarakat, transformasi digital dalam pelayanan publik, penguatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, serta tata kelola informasi dan keamanan siber.

Dengan pendekatan yang tepat, program dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak hanya

menjadi dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen kebijakan strategis yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat, mendukung reformasi birokrasi digital, serta mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan adaptif terhadap era digital.



Tabel 4.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT							
- Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya tata kelola Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi, Keterbukaan Informasi, serta Pelayanan Publik yang Transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai AKIP OPD (Angka)		
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, dan	

						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Fasilitas atau Kelengkapan yang mendukung Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Frekuensi tersedianya Administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Jumlah Total BMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah	

					Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa	

						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Frekuensi tersedianya jasa pemeliharaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Penguatan tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)		
			Meningkatnya jangkauan dan		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN	

			kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Jumlah layanan informasi, Telekomunikasi dan opini publik	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	

					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
			Terselenggaranya Layanan Pemerintah secara Digital		Indeks SPBE (Indeks)		
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Indeks)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Terkelolanya Pusat Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Portal Perangkat Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-	

ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-	

akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE	

					kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
					Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
			Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah		Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Jumlah OPD Penyelenggara Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik	

				diakses oleh pengguna data. (%)	Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
				Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
				Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Meningkatnya Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi		Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (%)		
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Persentase Layanan Pemerintahan yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	KETERANGAN (Peningkat Jarak)			
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		Target	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	X.XX.01	PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	71	75	80	84	88	90	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95			
				Nilai IKM	79,75	80	84	88	90	90	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95		
				Perencanaan Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan	11 Dokumen/Laporan
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
				Koordinasi dan Pengawasan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan
				Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
				Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
				Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/Semester SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengadaan paksa dan secara resmi barang/keperluan lainnya	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket
				Pengadaan dan Penyaluran Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
				Pengadaan dan Penyaluran Pegawai Berprestasi Lulusan dan Fungsi	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Komponen Infrastruktur Lahan/Perumahan Bergantung Kantor	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket
				Pengadaan Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang Ditetapkan	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket
				Pengadaan Bahan Logistik Kantor yang Ditetapkan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
Pengadaan Barang Cetak dan Pengiriman ke Daerah	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket				
Pengadaan Bahan Baku dan peralatan pendukung yang Ditetapkan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen				
Pengembangan Rasio Koordinasi dan Komunikasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				
Pengembangan Aplikasi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen				
Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkat Unsur Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas	-	-	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit				

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Penangkas Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	KETERANGAN (Penanggung Jawab)
						2025		2026		2027		2028		2029		2030							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)		X.XX.01.20002	Pengelolaan Kendaran Dinas Operasional atau Layanan	Jumlah Unit Kendaran Dinas Operasional atau Layanan yang Diadatkan	-	-	-	5 Unit	1.500.000.000	5 Unit	1.500.000.000	5 Unit	1.500.000.000	5 Unit	1.500.000.000	5 Unit	1.500.000.000	5 Unit	1.500.000.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	SDA	
			Pengelolaan Fasilitas dan Mekanik Lainnya yang Diadatkan	Jumlah Unit Fasilitas dan Mekanik Lainnya yang Diadatkan	15 Unit	15 Unit	150.000.000	15 Unit	250.000.000	15 Unit	250.000.000	15 Unit	250.000.000	15 Unit	250.000.000	15 Unit	250.000.000	15 Unit	1.400.000.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	SDA	
			Pengelolaan Motor	Jumlah Paket Motor yang Diadatkan	25 Unit	25 Unit	60.000.000	25 Unit	60.000.000	25 Unit	60.000.000	25 Unit	60.000.000	25 Unit	60.000.000	25 Unit	60.000.000	25 Unit	380.000.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	SDA	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadatkan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadatkan	1 Unit	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	2.400.000.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	SDA	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemukiman Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadatkan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pemukiman Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadatkan	20 Unit	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	1.200.000.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	SDA	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	36 Laporan	129.500.000	36 Laporan	164.500.000	36 Laporan	164.500.000	36 Laporan	600.000.000	36 Laporan	600.000.000	36 Laporan	600.000.000	36 Laporan	1.823.000.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	KASUBSAG UMUM & KEPEGAWAIAN	
			Penyediaan Jasa Sarat (Melayat)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sarat (Melayat)	12 Laporan	12 Laporan	4.500.000	12 Laporan	4.500.000	12 Laporan	4.500.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	418.000.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	SDA	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadatkan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	645.000.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	SDA	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	580.000.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	SDA	
			X.XX.01.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	30 Unit	100%	590.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	4.599.000.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	KASUBSAG UMUM & KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.20001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Kendaran Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Diadatkan dan dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaran Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Diadatkan dan dibayarkan Pakainya	10 Unit	20 Unit	150.000.000	20 Unit	250.000.000	20 Unit	250.000.000	20 Unit	250.000.000	20 Unit	250.000.000	20 Unit	250.000.000	20 Unit	1.400.000.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	SDA	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Fasilitas dan Mekanik Lainnya yang Diadatkan	Jumlah Fasilitas dan Mekanik Lainnya yang Diadatkan	10 Unit	30 Unit	40.000.000	30 Unit	50.000.000	30 Unit	50.000.000	30 Unit	50.000.000	30 Unit	50.000.000	30 Unit	50.000.000	30 Unit	290.000.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	SDA	
			Pemeliharaan (Rehabilitasi) Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	400.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	2.900.000.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	SDA	
			PROGRAS PENGLOLAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Penyediaan Tampilan Kapasitas Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (sangat)	65%	70%	10.242.524.500	72%	10.949.070.000	74%	10.447.327.000	76%	9.686.550.000	78%	9.626.550.000	80%	10.589.205.000	86%	51.914.676.300	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	BIDANG PKP DAN PLOP	
			2.16.02.21.02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	4 Media/Jumlah Aduan/Lembara penyiaran/Berita/DIP	10.242.524.500	10.949.070.000	4 Media/Jumlah Aduan/Lembara penyiaran/Berita/DIP	10.447.327.000	4 Media/Jumlah Aduan/Lembara penyiaran/Berita/DIP	9.686.550.000	4 Media/Jumlah Aduan/Lembara penyiaran/Berita/DIP	9.626.550.000	4 Media/Jumlah Aduan/Lembara penyiaran/Berita/DIP	10.589.205.000	20 Media/Jumlah Aduan/Lembara penyiaran/Berita/DIP	51.914.676.300	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	KABID		
			2.16.02.21.01.01.4	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memuat informasi sebagai bentuk 1. komunikasi secara pers, dan 2. terdistribusi di Dinas Komunikasi, dan 3. alat dalam kegiatan relasi media	4 Laporan	4 Laporan	8.886.550.000	4 Laporan	8.886.550.000	4 Laporan	8.886.550.000	4 Laporan	8.886.550.000	4 Laporan	8.886.550.000	4 Laporan	8.886.550.000	20 Laporan	41.419.300.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	KABID
			2.16.02.21.01.01.6	Kemampuan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif berkomunikasi informasi dan terdistribusi di Dinas Komunikasi	-	5 Komunitas	53.042.000	10 Komunitas	65.000.000	20 Komunitas	120.000.000	20 Komunitas	120.000.000	20 Komunitas	120.000.000	25 Komunitas	200.000.000	25 Komunitas	666.042.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	KABID
			2.16.02.21.01.01.6	Dukungan Administrasi, Keuangan, dan Tata Kelola Komunikasi dan Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administrasi, Keuangan, dan Tata Kelola Komunikasi dan Informasi Publik yang diterima dan terdistribusi di Dinas Komunikasi	-	-	-	4 Laporan	167.520.000	4 Laporan	1.500.777.000	4 Laporan	800.000.000	4 Laporan	800.000.000	4 Laporan	1.042.655.000	4 Laporan	4.940.652.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	KABID
			2.16.02.21.01.01.7	Penyusunan Informasi Publik	Jumlah penyusunan Informasi Publik yang diterbitkan sesuai peraturan perundang	-	5 Penerbitan	46.170.000	5 Penerbitan	110.000.000	5 Penerbitan	130.000.000	5 Penerbitan	110.000.000	5 Penerbitan	130.000.000	7 Penerbitan	200.000.000	32 Penerbitan	686.170.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	KABID
			2.16.02.21.01.01.8	Standarisasi Penilaian Komunikasi Publik	Penelitian dan analisis sistem yang terdistribusi di Dinas Komunikasi dan Informasi Publik	60%	-	-	62%	250.000.000	68%	300.000.000	75%	300.000.000	60%	350.000.000	85%	500.000.000	85%	1.700.000.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	KABID
2.16.02.21.01.01.9	Monitoring Informasi Kabupaten, Kota, dan Aspirasi Publik	Jumlah monitoring informasi Kabupaten, Kota, dan Aspirasi Publik yang berkembang dan terdistribusi di Dinas Komunikasi dan Informasi Publik	-	4 rekon	50.952.000	4 rekon	120.000.000	4 rekon	120.000.000	4 rekon	120.000.000	4 rekon	120.000.000	4 rekon	170.000.000	20 rekon	700.352.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	KABID			
2.16.02.21.01.02.0	Diseminasi Informasi	Jumlah informasi yang terdistribusi di Dinas Komunikasi dan Informasi Publik	75%	75%	700.000.000	76%	700.000.000	78%	700.000.000	79%	700.000.000	80%	700.000.000	82%	700.000.000	82%	4.200.000.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	KABID			
2.16.02.21.01.02.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang terdistribusi di Dinas Komunikasi dan Informasi Publik	-	3 Media	364.380.500	3 Media	150.000.000	3 Media	440.000.000	3 Media	600.000.000	3 Media	440.000.000	3 Media	490.000.000	3 Media	2.484.380.500	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	KABID			
2.16.02.21.01.02.2	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang	-	-	-	-	-	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	1.250.000.000	Dikomisib	Tanjung Jabung Barat	KABID			

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Basis/Me 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi	KETERANGAN (Penanggung Jawab)		
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra							
						Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	Target 19	Rp 20	21	22				
Tertindakannya Layanan Pemerintah Secara Digital		2.16.02.2.01.002.1	Penyusunan Konten Publik	Jumlah Konten Informasi Publik	-	500 Konten	138.450.000	550 Konten	350.000.000	650 Konten	450.000.000	700 Konten	500.000.000	750 Konten	550.000.000	850 Konten	650.000.000	850 Konten	2.638.450.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI			
		2.16.02.2.01.002.2	Pengaturan Kapasitas Konten Daya Menarik Komunitas Publik	Jumlah ASN atau komunitas publik yang dilistasi mengikuti kegiatan	-	-	-	8 Orang	100.000.000	12 Orang	120.000.000	12 Orang	150.000.000	15 Orang	160.000.000	20 Orang	300.000.000	47 Orang	820.000.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI			
		II	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Index SPBE	2,92	2,95	6.839.294.000	3,00	8.838.859.000	3,05	9.873.156.000	3,10	9.908.250.000	3,25	9.943.359.000	3,35	9.837.865.000	3,35	52.238.959.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	BIDANG E-GOV DAN TIK			
		II.3	Pengelolaan Domain yang Telah Dilepas	Nama Domain yang Telah Dilepas	31	31	3.500.000.000	44	3.500.000.000	44	3.500.000.000	44	3.500.000.000	44	3.500.000.000	44	3.814.515.000	44	21.314.515.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KABID			
		2.16.02.2.01.004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain	Jumlah Dokumen Pengaturan Nama Domain dan Sub Domain	-	1 Dokumen	3.500.000.000	1 Dokumen	3.500.000.000	1 Dokumen	3.500.000.000	1 Dokumen	3.500.000.000	1 Dokumen	3.500.000.000	1 Dokumen	3.814.515.000	5 Dokumen	21.314.515.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI			
		II.10	Pengelolaan Pemerintah Daerah	Terkecilnya Pusat Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Portal Perangkat Daerah	31	44	3.339.294.000	44	5.338.859.000	44	5.373.156.000	44	5.408.250.000	44	5.443.359.000	44	6.023.350.000	44	30.925.444.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KABID			
		2.16.02.2.02.01.1	Koordinasi Pemeliharaan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah diintegrasikan di Pusat Data Nasional	-	5 Aplikasi	125.000.000	5 Aplikasi	125.000.000	5 Aplikasi	125.000.000	5 Aplikasi	125.000.000	5 Aplikasi	125.000.000	5 Aplikasi	225.000.000	25 Aplikasi	850.000.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI			
		2.16.02.2.02.01.2	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	100.000.000	10 Dokumen	450.000.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI			
		2.16.02.2.02.02.1	Penyediaan Layanan dan Pemeliharaan Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	2.718.344.000	44 Perangkat Daerah	3.000.000.000	44 Perangkat Daerah	3.000.000.000	44 Perangkat Daerah	3.000.000.000	44 Perangkat Daerah	3.000.000.000	44 Perangkat Daerah	3.050.000.000	44 Perangkat Daerah	17.796.344.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI			
		2.16.02.2.02.02.2	Koordinasi pemeliharaan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Portal yang memandatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-	44 Layanan	99.100.000	44 Layanan	99.100.000	44 Layanan	99.100.000	44 Layanan	99.100.000	44 Layanan	99.100.000	44 Layanan	129.100.000	44 Layanan	694.800.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI			
		2.16.02.2.02.02.3	Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-	44 Dokumen	22.000.000	44 Dokumen	22.100.000	44 Dokumen	22.200.000	44 Dokumen	22.300.000	44 Dokumen	22.400.000	44 Dokumen	72.400.000	44 Dokumen	193.400.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI			
		2.16.02.2.02.03.1	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan pola rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemeliharaan dan pemantauan Aplikasi Khusus, yaitu:	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pemantauan aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100.000.000	1 Aplikasi	200.000.000	1 Aplikasi	200.000.000	1 Aplikasi	200.000.000	1 Aplikasi	200.000.000	1 Aplikasi	250.000.000	1 Aplikasi	1.150.000.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI			
		2.16.02.2.02.03.2	Penyediaan laporan perkembangan SPBE daerah	Jumlah laporan perkembangan SPBE daerah	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	50.000.000	5 Laporan	225.000.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI			
		2.16.02.2.02.03.3	Koordinasi dan Fasilitas Pemeliharaan dan/atau Pengembangan SPBE	Jumlah laporan Pemeliharaan Fasilitas Pemeliharaan SPBE dan/atau koordinasi pengembangan SPBE	1 Laporan	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	175.000.000	5 Laporan	800.000.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI			
2.16.02.2.02.03.4	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memandatkan akses internet yang disediakan	Perangkat Daerah	-	-	-	44 Perangkat Daerah	600.000.000	44 Perangkat Daerah	625.000.000	44 Perangkat Daerah	650.000.000	44 Perangkat Daerah	675.000.000	44 Perangkat Daerah	750.000.000	44 Perangkat Daerah	3.300.000.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI				
2.16.02.2.02.03.5	Koordinasi penyusunan kebijakan dan/atau SPBE sesuai kebutuhan, pola rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan dan/atau SPBE meliputi: pola rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	-	-	-	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.050.000.000	5 Dokumen	5.050.000.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI					
2.16.02.2.02.03.6	Koordinasi dan Fasilitas Pemeliharaan dan/atau Pengembangan SPBE	Jumlah laporan Pemeliharaan Fasilitas Pemeliharaan SPBE dan/atau koordinasi pengembangan SPBE	-	-	-	5 Unit	15.000.000	15 Unit	25.000.000	25 Unit	35.000.000	35 Unit	45.000.000	35 Unit	85.000.000	35 Unit	215.000.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI					
2.16.02.2.02.03.7	Koordinasi Pengelolan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang disediakan pemerintah Kabupaten/ Kota/ Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	46.850.000	1 Dokumen	46.850.000	1 Dokumen	46.850.000	1 Dokumen	46.850.000	1 Dokumen	46.850.000	1 Dokumen	96.850.000	5 Dokumen	331.100.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI					
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintah	2.26.02	PROGRAM PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL	Index Pembangunan Statistik (IPS)	2,23	2,23	56.000.000	2,35	140.000.000	2,35	175.000.000	2,50	210.000.000	2,50	215.000.000	2,69	236.500.000	2,69	656.500.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	BIDANG TIK				
2.20.02.2.1	Penyelenggaraan Statistik Sektor	Jumlah OPD Penyelenggara Statistik Sektor	44 OPD	44 OPD	50.000.000	44 OPD	140.000.000	44 OPD	175.000.000	44 OPD	210.000.000	44 OPD	215.000.000	44 OPD	236.500.000	44 OPD	656.500.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KABID					
2.20.02.2.1.01.01	Pengukuran Kualitas Statistik Sektor	Persentase Angket statistik sektoral yang memiliki skor diatas skor pengguna data	-	75%	50.000.000	80%	55.000.000	80%	60.000.000	100%	85.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	370.000.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI					
2.20.02.2.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di tingkat daerah	-	-	-	3 Orang	45.000.000	5 Orang	75.000.000	7 Orang	125.000.000	7 Orang	105.000.000	10 Orang	125.500.000	32 Orang	456.500.000	Disinformo	Tanjung Jabung Bar	KASI					

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	KETERANGAN (Penanggung Jawab)	
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
						Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	Target 19	Rp 20				21
Meningkatnya Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi			2.20.02.01.002	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik	Jumlah laporan penyelenggaraan forum atau forum daerah	-		1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	5 Laporan	200.000.000	Diskominfo	Tanjung Jabung Barat	KASI	
			2.21.02	PROGAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keselamatan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	40%	40%	175.000.000	47%	1.075.000.000	54%	1.085.000.000	63%	1.095.000.000	70%	1.455.000.000	80%	1.600.500.000	80%	6.485.300.000	Diskominfo	Tanjung Jabung Barat	BIDANG TK
			2.21.02.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pemertitahan yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik	40%	40%	175.000.000	47%	1.075.000.000	54%	1.085.000.000	63%	1.095.000.000	70%	1.455.000.000	80%	1.600.500.000	80%	6.485.300.000	Diskominfo	Tanjung Jabung Barat	KABID
			2.21.02.2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemertitahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemertitahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	31 Laporan	250.000.000	31 Laporan	250.000.000	31 Laporan	250.000.000	40 Laporan	550.000.000	44 Laporan	450.000.000	44 Laporan	1.550.000.000	Diskominfo	Tanjung Jabung Barat	KASI	
			2.21.02.2	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Pemertitahan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Pemertitahan Daerah	Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	6 Laporan	150.000.000	Diskominfo	Tanjung Jabung Barat	KASI
			2.21.02.2	Pelayanan Layanan Keamanan Informasi dan Pemertitahan Daerah	Jumlah Pengingat Daerah yang Tidak Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Pemertitahan Daerah	-	8 Pengingat Daerah	150.000.000	16 Pengingat Daerah	750.000.000	24 Pengingat Daerah	750.000.000	32 Pengingat Daerah	750.000.000	40 Pengingat Daerah	1.000.000.000	44 Pengingat Daerah	1.045.500.000	44 Pengingat Daerah	4.445.500.000	Diskominfo	Tanjung Jabung Barat	KASI
			2.21.02.2	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Pemertitahan Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Pemertitahan Daerah yang ditetapkan dan ditetapkan	-		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	4 Dokumen	340.000.000	Diskominfo	Tanjung Jabung Barat	KASI	
				JUMLAH				24.301.813.999		31.185.214.149		30.788.571.149		30.087.894.149		30.863.494.149		32.887.664.149		169.983.101.744			

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam penajaman arah pembangunan yang difokuskan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029, Dinas Komunikasi dan Informatika memerlukan perumusan subkegiatan prioritas yang disusun secara selektif dan strategis. Subkegiatan prioritas tersebut dipilih berdasarkan tingkat urgensi, potensi dampak yang ditimbulkan, serta relevansinya terhadap penyelesaian isu-isu strategis di sektor komunikasi dan informatika, antara lain penguatan literasi digital masyarakat, pengembangan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kapasitas dan keamanan sipstem informasi publik.

Selain itu, subkegiatan juga dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penetapan subkegiatan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor, efektivitas pelaksanaan, serta dukungan terhadap akselerasi pencapaian indikator kinerja utama daerah.

Dengan pendekatan tersebut, subkegiatan yang ditetapkan diharapkan mampu mempercepat realisasi outcome pembangunan di bidang komunikasi dan informatika yang inklusif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berkelanjutan. Subkegiatan tersebut menjadi bagian integral dari upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, memperkuat pelayanan publik berbasis digital, dan mendorong integrasi sistem informasi daerah yang lebih efisien dan responsif.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Relasi Media	
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
			Pelayanan Informasi Publik	
			Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			Diseminasi Informasi	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
			Penyusunan Konten	
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
			Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
			Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
			Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
			Penyediaan Akses Internet	
			Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
			Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Tabel 4.4 menggambarkan keterkaitan yang erat antara program prioritas pembangunan daerah dan subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dirancang untuk mendukung pencapaian outcome strategis di sektor komunikasi dan informatika. Setiap subkegiatan memiliki peran yang spesifik dalam merespons isu-isu utama seperti kesenjangan literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur dan jaringan TIK, rendahnya kualitas tata kelola informasi publik, serta masih terbatasnya perlindungan data dan keamanan siber di tingkat daerah.

Sebagai contoh, pengembangan dan pengelolaan pusat data daerah tidak hanya memperkuat sistem informasi pemerintahan, tetapi juga menjadi fondasi bagi integrasi layanan digital lintas sektor secara lebih efisien dan aman. Di sisi lain, pelaksanaan diseminasi informasi publik dan edukasi literasi digital kepada masyarakat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesadaran, partisipasi, dan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah. Subkegiatan lain seperti penguatan kelembagaan PPID dan pengembangan aplikasi layanan publik digital juga memainkan peran penting dalam menciptakan tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, subkegiatan yang tercantum dalam tabel menunjukkan pendekatan yang integratif dan adaptif terhadap kebutuhan aktual sektor komunikasi dan informatika di daerah. Setiap outcome yang ingin dicapai mencerminkan arah pembangunan yang tidak hanya menitikberatkan pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlindungan data, serta pemberdayaan masyarakat di era digital. Dengan demikian, Tabel 4.4 menegaskan pentingnya perencanaan subkegiatan yang strategis, terukur, dan berorientasi hasil agar program-program Diskominfo benar-benar dapat mendorong pencapaian visi pembangunan daerah yang inklusif, modern, dan berkelanjutan.

4.5 Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta target lima tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 merupakan alat ukur utama

untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dapat dicapai secara sistematis dan berkelanjutan. IKU ini dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Perumusan IKU juga memperhatikan relevansi dengan isu-isu strategis komunikasi dan informatika, seperti peningkatan literasi digital masyarakat, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, transformasi digital dalam pelayanan publik, keterbukaan informasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem keamanan informasi daerah.

Setiap indikator dilengkapi dengan target tahunan yang terukur, mulai dari tahun 2025 hingga 2029, untuk memberikan gambaran mengenai progres pencapaian secara bertahap. Target tersebut disusun guna mendorong pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan, efisien, serta responsif terhadap dinamika dan tantangan era digital. Dengan penetapan IKU dan target lima tahunan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan, menyusun langkah-langkah perbaikan kebijakan apabila diperlukan, serta memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	45	47	54	63	70	80	
2	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survey)	%	70	72	74	76	78	80	
3	Indeks SPBE	Indeks	2,95	3,00	3,05	3,10	3,25	3,35	
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,23	2,35	2,35	2,50	2,50	2,60	
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	80	82	85	88	90	92	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. IKK memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah di sektor komunikasi dan informatika, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, transformasi digital, dan literasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Melalui IKK, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menilai efektivitas berbagai intervensi kebijakan yang telah dilaksanakan, serta mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah. IKK juga menjadi acuan penting dalam penguatan tata kelola internal perangkat daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan perumusan strategi perbaikan berbasis data.

Dengan demikian, penetapan IKK tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban perencanaan dan pelaporan, tetapi lebih dari itu, sebagai alat kendali untuk memastikan bahwa pembangunan sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat benar-benar berjalan secara terarah, efektif, dan berdampak. Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	41,40	43,55	46,77	56,45	57,53	60,22	
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah (e-walidata)	%	60	70,97	90	100	100	100	
5	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	17	34	51	68	85	100	
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung prioritas pembangunan nasional

maupun daerah, serta mendorong akselerasi transformasi digital melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur, realistis, dan progresif. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menjadi alat ukur pencapaian kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai arah strategis dan instrumen kendali operasional tahunan yang memperkuat integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor komunikasi dan informatika.

Dengan kerangka pengukuran kinerja yang terstruktur dan berbasis hasil, Dinas Komunikasi dan Informatika mampu mengelola dinamika perubahan secara sistematis, meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan digital, serta memastikan bahwa kebijakan dan layanan yang diberikan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penetapan IKU dan IKK juga berperan penting dalam memastikan keterpaduan antarprogram, meningkatkan akuntabilitas birokrasi, dan mendukung pencapaian pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan di era transformasi digital.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang disusun untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029.

Renstra ini memuat arah kebijakan teknokratik yang sistematis, terukur, dan dapat diimplementasikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada analisis kondisi eksisting, isu-isu strategis, serta hasil telaahan terhadap kebijakan pusat dan daerah, termasuk integrasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dokumen ini menjadi acuan normatif dan operasional dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta penganggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika.

Renstra ini disusun untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sektoral. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang selaras dengan RPJMD, guna menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dokumen ini bersifat dinamis dan terbuka terhadap penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebijakan nasional maupun dinamika lingkungan strategis di tingkat daerah. Oleh karena itu, pelaksanaannya memerlukan komitmen seluruh jajaran perangkat daerah, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor, efisiensi sumber daya, dan integrasi sistem informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu menjadi dokumen arah pembangunan strategis yang implementatif dan berdampak nyata terhadap

peningkatan kualitas pelayanan publik serta akselerasi transformasi digital di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal

Pada tanggal : Juli 2025

KEPALA DINAS



JOAN PRAYUDA, SE., MM

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19810829 201001 1 010